

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 ini dapat selesai disusun.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kepada masyarakat. LKjIP ini bertujuan untuk menginformasikan capaian keberhasilan kinerja atas sasaran strategis melalui penyajian capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, laporan ini juga merupakan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022 ini disusun, semoga bermanfaat. Masukan dan saran guna peningkatan kinerja maupun peningkatan kualitas dalam penyusunannya sangat diharapkan.

Ketapang, Februari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG


Drs. HERYANDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19711023 199101 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Capaian kinerja sasaran strategis ke-1 yaitu **“Meningkatnya Ketahanan Pangan**, diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu **Indeks ketersediaan, Indeks Keterjangkauan dan Indeks Pemanfaatan**.
 - Untuk mencapai sasaran tersebut di atas didukung oleh **4 (empat) Program** yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.
 - Target kinerja dari indikator sasaran strategis **“Meningkatnya Ketahanan Pangan”** untuk **“Indeks Ketersediaan”** adalah **86,73** terealisasi dengan nilai **84,22** atau **97,11%**, sedangkan target untuk **“Indeks Keterjangkauan”** adalah **82,32** terealisasi dengan nilai **83,30** atau **101,19%**, dan untuk **“Indeks Pemanfaatan”** adalah **61,43**, terealisasi dengan nilai **60,38** atau **98,29%**. Dengan demikian capaian kinerja untuk **“Meningkatnya Ketahanan Pangan”** hanya tercapai untuk **“Indeks Keterjangkauan”**.
 - Jika dibandingkan dengan capaian kinerja untuk **“Indeks Ketahanan Pangan”** Kabupaten lain di Kalimantan Barat, maka posisi Kabupaten Ketapang berada pada urutan ke-5 (lima) setelah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kayong Utara dan Mempawah, dan jika dibandingkan dengan IKP Provinsi Kalimantan Barat dan IKP skala Nasional maka posisi Kabupaten Ketapang berada di atas IKP Provinsi Kalimantan Barat dan IKP Nasional.

2. Capaian kinerja sasaran strategis ke-2 (dua) yaitu **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap”**:
 - Diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu **Jumlah produksi perikanan tangkap** termasuk didalamnya produksi hasil perikanan dari wilayah perairan umum (sungai) dibandingkan dengan target tahunan.
 - Untuk mencapai indikator sasaran tersebut di atas didukung oleh **1 (satu) Program** yaitu **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**.
 - Target kinerja sasaran untuk indikator produksi perikanan tangkap adalah **24.428,05 ton** dan terealisasi sebesar **25.730 ton** atau **105,33%**. Dengan demikian capaian kinerja untuk produksi perikanan tangkap sudah mencapai target.
 - Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka capaian kinerja pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, posisi Kabupaten Ketapang masih di bawah Kabupaten Kubu Raya.
3. Capaian kinerja sasaran strategis ke-3 (tiga) yaitu **“Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”**:
 - Diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu **Jumlah produksi perikanan Budidaya** dibandingkan dengan target tahunan.
 - Untuk mencapai sasaran tersebut di atas didukung oleh **1 (satu) Program** yaitu **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**.
 - Target kinerja sasaran untuk indikator produksi perikanan budidaya adalah **20.787,93 ton** dan terealisasi sebesar **16.377,15 ton** atau **78,78%**. Dengan demikian capaian kinerja untuk produksi perikanan budidaya belum mencapai target.
 - Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka capaian kinerja pada tahun 2022 untuk jumlah produksi perikanan budidaya menunjukkan penurunan. Salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinya bencana banjir di Kabupaten Ketapang.

4. Capaian kinerja sasaran strategis ke-4 (empat) yaitu **“Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan”**:
 - Diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu **“Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat”**.
 - Untuk mencapai sasaran tersebut di atas didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - Target kinerja sasaran untuk indikator **“Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat”** adalah **11%** dan terealisasi sebesar **8,25%** atau tingkat capaiannya baru **75,0%**. Dengan demikian capaian kinerja untuk persentase produk perikanan yang bersertifikat belum mencapai target.

5. Capaian kinerja sasaran strategis ke-5 (lima) yaitu **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan”**:
 - Diukur dengan indikator **“Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan”** berdasarkan hasil Review APIP.
 - Untuk mencapai sasaran tersebut di atas didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
 - Target indikator sasaran strategis yaitu **“Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan”** adalah **12** atau Nilai C dan terealisasi dengan skor **3,86** atau Nilai D. Dengan demikian capaian kinerjanya belum tercapai.
 - Jika dibandingkan dengan nilai Reformasi Birokrasi tahun 2021, maka capaian kinerja pada tahun 2022 belum terjadi peningkatan yang signifikan dari skor **3,48** atau Nilai D.

Untuk meningkatkan capaian kinerja seluruh sasaran strategis tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus perhatian bagi

seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang yaitu:

1. Peningkatan koordinasi kepada semua stakeholder terhadap faktor-faktor penentu untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang;
2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan harga pangan yang dikonsumsi masyarakat sesuai kewenangan kabupaten;
3. Peningkatan bantuan Alat Tangkap Ikan yang ramah lingkungan, Sarana Prasarana lain serta Peningkatan Kapasitas Nelayan di Kabupaten Ketapang;
4. Penyediaan bantuan bibit ikan yang unggul dan Pakan Ikan yang baik serta Pembinaan dan Pelatihan untuk kelompok Pembudidaya Ikan;
5. Peningkatan pengawasan kegiatan perikanan sesuai kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang;
6. Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi kelompok usaha pengolahan hasil perikanan skala Mikro dan Kecil ;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga teknis di bidang ketahanan pangan dan pada bidang perikanan terutama untuk tenaga teknis di unit pelaksana teknis DKPP; dan
8. Melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi pada 8 area perubahan melalui aksi-aksi perubahan budaya kerja secara konsisten menuju perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran strategis Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.18.645.193.608,-** dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang dan terealisasi sebesar **Rp.16.393.942.102,96,-** atau **87,93%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.3. Isu-Isu Strategis.....	7
1.4. Keadaan Pegawai	9
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	10
1.6. Keuangan	12
1.7. Sistematika LKjIP.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022	18
2.4. Instrumen Pendukung	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	28
3.3. Realisasi Anggaran	58
3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	60
BAB IV PENUTUP	62

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Foto Dokumentasi Kegiatan

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati atas kinerja yang telah diperjanjikan dan dicapai dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang serta sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja untuk periode waktu berikutnya.

Dalam laporan kinerja ini disajikan data program dan kegiatan maupun alokasi anggaran per sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagaimana tertuang pada APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022 termasuk perubahan APBD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang. Namun sebelum menyajikan dan melakukan analisis tentang capaian kinerja pada bab berikutnya terlebih dahulu digambarkan kondisi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga Desember 2022.

1.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, maka Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketahanan Pangan;
4. Bidang Perikanan Tangkap;
5. Bidang Perikanan Budidaya; dan
6. UPTD Perikanan Budidaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan bidang perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui perangkat organisasinya yang terdiri dari unsur Sekretariat Dinas dan bidang-bidang teknis yaitu:

1.2.1.1. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas sub bagian dan pejabat fungsional selaku koordinator.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas maka sekretariat dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan dinas;
- 2) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
- 3) Penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
- 6) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada unit fungsional penyusunan program dan pelaporan, unit fungsional keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretaris Dinas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada pejabat fungsional penyusunan program, pengelolaan keuangan, dan kepala sub bagian umum, kepegawaian, perlengkapan, dan evaluasi serta pelaporan dinas.

1.2.1.2. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Ketahanan Pangan.
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.3. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Tangkap.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- 2) Perumusan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Perikanan Tangkap;
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.4. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perikanan budidaya menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang perikanan budidaya;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
- 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Bidang Perikanan budidaya;
- 6) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya; dan
- 7) Pelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.2.1.5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Budidaya

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, dan membawahi unit Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), Unit Pelaksana

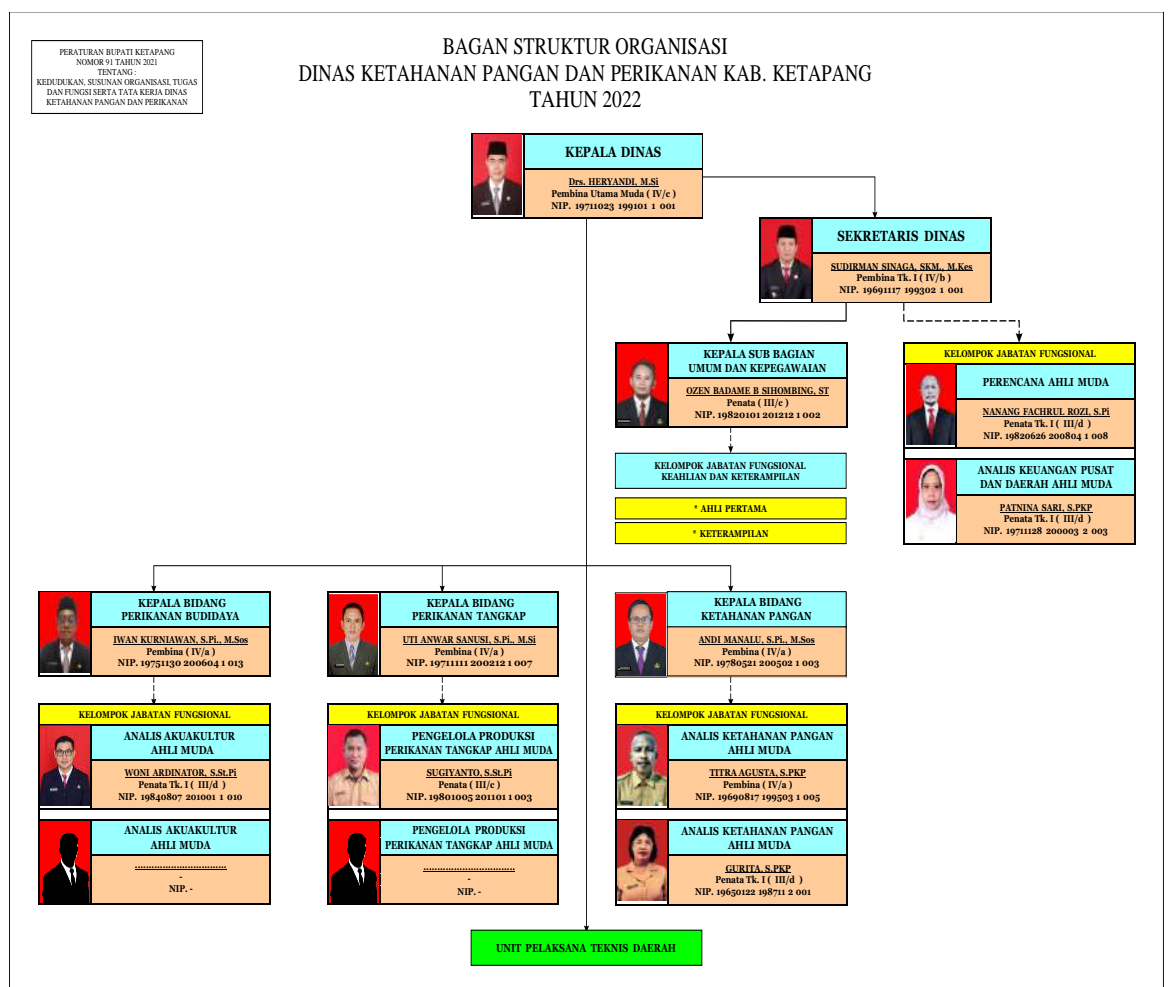
Perikanan (UPP). UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas. Dalam pelaksanaan tugas teknis, UPTD Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan UPTD Perikanan Budidaya; dan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.

1.2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pada gambar berikut ini ditampilkan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



1.3. Isu-Isu Strategis

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, kondisi sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pencapaian kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya lahan produksi pangan akibat maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi tanaman perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan di Kabupaten Ketapang.
2. Masih sulitnya kondisi infrastruktur antar wilayah kecamatan untuk mendukung jalur distribusi pangan di Kabupaten Ketapang sehingga kondisi tersebut berdampak pada kondisi ketahanan pangan dan harga pangan.
3. Belum optimalnya upaya program diversifikasi pangan non nasi, termasuk pengawasan pangan segar asal tumbuhan agar terjamin kualitasnya.
4. Adanya penurunan potensi sumberdaya Ikan akibat gangguan ekosistem air (terumbu karang dan mangrove), kelebihan tangkapan (*overfishing*), penggunaan alat tangkap terlarang (*mini trawl*), penggunaan bahan peledak dan meningkatnya kegiatan industri perkebunan dan pertambangan.
5. Penurunan produksi perikanan di wilayah perairan umum karena beberapa sebab indikatif, seperti kurangnya pengetahuan/kapasitas SDM nelayan, kurangnya peralatan perikanan tangkap yang memadai, belum optimalnya pengawasan di kawasan perikanan tangkap (masyarakat masih ada yang menggunakan racun ikan, setrum), dan belum optimalnya sarana prasarana perikanan tangkap.
6. Belum optimalnya pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai modal dasar dalam percepatan pertumbuhan perekonomian

daerah dan peningkatan kesejateraan masyarakat yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan prasarana, terbatasnya akses permodalan, kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi harga pasar, dan terbatasnya prasarana industri pengolahan hasil ikan.

7. Keamanan pangan produk hasil pengolahan ikan yang kurang memenuhi persyaratan mutu yaitu bebas dari bahan tambahan yang dilarang seperti formalin.
8. Sulitnya nelayan perikanan tangkap/perairan umum untuk mendapatkan BBM Solar Bersubsidi yang disediakan Pemerintah sehingga berpengaruh kepada frekuensi aktivitas penangkapan ikan di laut dan hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi perikanan tangkap sepanjang tahun.

Dari berbagai permasalahan pada sektor ketahanan pangan dan perikanan yang dihadapi, tantangan dan potensi mendasari perumusan isu-isu strategis bidang ketahanan pangan dan perikanan.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kontribusi dari potensi sumber daya alam yang cukup besar di sektor pangan padahal dengan luasnya lahan pertanian seharusnya dapat meningkatkan produksi dan cadangan pangan daerah yang kemudian dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang.
2. Belum optimalnya kontribusi sumberdaya dari sektor perikanan cukup besar dengan potensi sumber daya lahan dan luas perairan yang menjadi kewenangan daerah terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Ketapang.
3. Tingginya potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan pertambangan sehingga berpengaruh pada produksi pangan dan kurangnya lahan untuk perikanan budidaya.
4. Perlunya pengembangan sentra produksi pangan yang terpadu dari berbagai sektor (pengembangan agropolitan) untuk mendukung ketahanan pangan daerah

1.4. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak (Non PNS) hingga akhir Desember tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebanyak **103 orang** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II.b	1	0,97
2	Eselon III.a	1	0,97
3	Eselon III.b	3	2,91
4	Eselon IV.a	2	1,94
5	Eselon IV.b	1	0,97
6	Non Eselon/ Staf PNS	34	33,01
	Sub Total PNS	42	40,78
7	Non Eselon/ Staf Non PNS	61	59,22
Total		103	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya 40,78%, selebihnya yaitu sebesar 59,22% berstatus sebagai tenaga Non PNS atau tenaga kontrak.

Tabel 1.2
Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
A	CPNS / PNS		
1	SLTA	16	38,10
2	D-III	2	4,76
3	D-IV	2	4,76
4	S-1	16	38,10
5	S-2	6	14,29
	Sub Total	42	100,00
B	NON PNS		
1	SD	8	13,11
2	SLTP	5	8,20
3	SLTA	19	31,15
4	D-III	13	21,31
5	D-IV	1	1,64
6	S-1	15	24,59
7	S-2	0	-
	Sub Total	61	100,00
	Total	103	

Tingkat Pendidikan PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berdasarkan tabel tersebut di atas sebesar 38,10% masih tingkat SLTA ke bawah, kemudian 38,10% Pendidikan strata-1 dan 14,29% strata-2. Pendidikan tenaga Non PNS dari 61 orang proporsi Pendidikan dengan tingkat SLTA ke bawah masih sebesar 52,46%.

Pada tabel di bawah ini juga ditampilkan distribusi pegawai berdasarkan golongan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan
pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	7	16,67
2	Golongan III	21	50,00
3	Golongan II	14	33,33
Total		42	100,00

Kondisi ketenagaan hingga akhir Desember 2022 belum memadai, terutama untuk tenaga-tenaga teknis fungsional di bidang ketahanan pangan, teknologi hasil pertanian, tenaga teknis perikanan, tenaga teknis di bidang keuangan, teknologi informasi (IT) dan tenaga administrasi keuangan/akuntansi masih sangat dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat berjalan lebih optimal.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga akhir tahun 2022 masih belum memadai. Kondisi ruangan gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai layanan publik masih layak namun perlu dilakukan rehabilitasi ruangan seperti ruang untuk konsultasi, ruang untuk ibu menyusui, ruangan untuk rapat yang memadai, dan rehabilitasi kamar mandi/wc untuk umum, kemudian perbaikan jalan lingkungan dan halaman

kantor, penataan taman kantor dan pembangunan prasarana parkir kendaraan serta rehab atap dan pengecatan gedung rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan prasarana peralatan kerja seperti Televisi, Notebook/PC, Printer, Kamera, Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan masih sangat diperlukan. Berikut ini adalah kondisi gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang hingga Desember 2022.

Gambar 1.2
Kondisi Gedung Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2022



Gambaran lebih rinci terkait ketersediaan sarana prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Keadaan Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022

No	Nama Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Dinas	1 Unit	Rusak Ringan
2	Gedung UPTD Perikanan Budidaya	1 Unit	Rusak Ringan
3	Balai Benih Ikan (BBI)	2 Unit	Rusak Sedang
4	Panti Benih	1 Unit	Rusak Ringan
5	BBIP Kendawangan	1 Unit	Rusak Ringan
6	Pos UPP	12 Unit	Rusak Ringan
7	Pos Penyuluh	3 Unit	Rusak Ringan
8	Pos Kesehatan Ikan	1 Unit	Rusak Ringan
9	Kolam Ikan Percontohan	1 Buah	Rusak Ringan
10	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	4 Unit	3 Rusak Ringan, 1 Rusak Sedang
11	Kendaraan Dinas Roda 2	29 Unit	28 Rusak Ringan, 1 Baik

1.6 Keuangan

Anggaran untuk belanja program dan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang dan DAK sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang tentang Penjabaran APBD yang dirinci dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan anggaran (DPA/DPPA).

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan pada tahun anggaran 2022 sebelum perubahan adalah sebesar Rp.14.589.306.519,- dan setelah perubahan APBD bertambah menjadi Rp.18.645.193.608,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.393.942.102,96,- atau 87,93%. Total anggaran tersebut sudah termasuk untuk belanja pegawai termasuk untuk belanja pembayaran honorarium pegawai Non PNS pada masing-masing bidang/unit kerja.

Alokasi anggaran yang tersedia masih belum memadai atau mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang ketahanan pangan, perikanan tangkap dan perairan umum serta perikanan budidaya termasuk untuk kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pengolahan hasil perikanan.

1.7 Sistematika LKjIP

Penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini disusun dengan sistematika berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 060/0243/OR-C tertanggal 31 Januari 2021 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bab ini diuraikan tentang Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, tugas dan fungsi, isu-isu strategis yang dihadapi, keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, informasi anggaran/keuangan dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang Perencanaan Strategis, Visi, Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kemudian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Anggaran Tahun 2022 serta instrument pendukung lainnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis dan Realisasi Anggaran dalam rangka mencapai masing-masing sasaran strategis.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi Misi Kepala Daerah

Perencanaan kinerja dan penganggaran berbagai program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis tahun anggaran 2022 merupakan **Tahun ke-1 (kesatu)** dari periode Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yaitu *"Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera"*. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan perikanan adalah dalam rangka mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ke-1 (satu) yaitu *"Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik"* dan Misi ke-5 (kelima) yaitu *"Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat"*.

Merujuk pada misi tersebut di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kedaulatan pangan dengan terjaminnya ketahanan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor perikanan tangkap dan perairan umum, perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 melalui misi ke-1 (satu) yaitu *"Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik"* dan misi ke-5 (lima) yaitu *"Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat"*, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam jangka menengah beserta indikator kinerjanya akan diwujudkan melalui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2016-2022, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kedaulatan Pangan	-	Indeks Ketahanan Pangan	76,8	78,56	80,32	82,08	83,84
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	86,73	87,64	87,96	88,84	88,97
			Indeks Keterjangkauan	82,32	83,43	83,85	84,74	84,87
			Indeks Pemanfaatan	61,43	62,44	62,56	63,44	63,88
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	-	Laju Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan	0,41	0,83	2,07	3,62	4,53
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	24.428,05	26.648,78	28.869,52	31.090,24	33.310,98
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	20.787,93	22.866,73	25.153,40	27.668,74	30.435,61
		Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	11%	11%	12%	12%	12%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Menopang Pelayanan Publik	-	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	58 (CC)	60,01 (B)	62 (B)	66 (B)	70 (BB)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12 (C)	17 (C)	20 (CC)	21,8 (B)	23 (B)

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka ditetapkan upaya-upaya melalui penetapan strategi dan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

VISI : Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera				
MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan menopang pelayanan publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Peningkatan Kelembagaan Berbasis Kinerja	Peningkatan ketersediaan dan kualitas data kinerja	
			Pelaksanaan, Penyusunan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	
			Pelaksanaan pemerintahan dengan Akuntabel, Handal dan Terpercaya	
			Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah	
			Peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional	
			Peningkatan sistem pelayanan publik daerah	
			Peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa	
MISI 5 : Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Peningkatan stok cadangan pangan Pengembangan food estate sebagai pusat pangan daerah Peningkatan lumbung pangan dan sarana pendukungnya	
		Peningkatan akses distribusi pangan	Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung distribusi pangan Pengembangan toko tani	
		Peningkatan konsumsi pangan alternatif	Peningkatan diversifikasi pangan non-nasi	
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan pengetahuan / kapasitas SDM nelayan	
			Peningkatan peralatan perikanan tangkap	
			Peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap	
			Penurunan penggunaan racun ikan dan setrum di kawasan perikanan tangkap	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan pengetahuan / kapasitas SDM pelaku pembudidaya	
			Peningkatan jangkauan distribusi benih ikan budidaya	
			Peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya	
			Penurunan penggunaan keramba yang berlebihan di kawasan sungai	
	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Peningkatan Penjaminan Mutu dalam pengolahan ikan segar
				Optimalisasi perikanan berbasis teknologi

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dengan Kepala Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	86, 73
		Indeks keterjangkauan	82,32
		Indeks pemanfaatan	61,43
2	Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	24.428,05 ton
3	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	20.787,93 ton
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	11%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12 (C)
No.	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.803.961.210,-	APBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 1.130.000.000,-	APBD
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.065.861.383,-	APBD
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 143.706.735,-	APBD
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 48.500.000,-	APBD
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 4.378.292.159,-	APBD
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 4.040.236.263,-	APBD
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 34.635.858,-	APBD
Total		Rp 18.645.193.608,-	

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran. Penetapan indikator kinerja pada saat perencanaan kinerja akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/Definisi
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	Angka	Hasil Penilaian Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional
		Indeks keterjangkauan	Angka	Hasil Penilaian Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional
		Indeks pemanfaatan	Angka	Hasil Penilaian Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional
2	Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Volume Produksi Perikanan Tangkap dalam 1 Tahun dibandingkan dengan Target Tahunan
3	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Volume Produksi Perikanan Budidaya dalam 1 Tahun dibandingkan dengan Target Tahunan
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	%	Jumlah Produk Olahan Perikanan yang Bersertifikat dibagi Total Olahan Perikanan x 100%

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022

2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Struktur anggaran belanja untuk program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang terdiri atas anggaran program dan kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian sasaran strategis maupun belanja program dan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis. Jumlah anggaran belanja untuk program prioritas dan untuk program penunjang/pendukung adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Belanja Program Prioritas dan Program Penunjang
Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Perubahan APBD)

No	Tahun Anggaran	Rincian Anggaran		Jumlah
		Program Prioritas	Program Penunjang	
1	2	3	4	5
1	2022	Rp. 7.319.277.717,-	Rp. 7.270.028.802,-	Rp.14.589.306.519,-

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dialokasikan pada 5 (lima) sasaran strategis. Rincian alokasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6.
Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
menurut Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Perubahan APBD)

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rp. 1.620.534.218,-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 3.508.292.159,-
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Rp. 1.962.814.702,-
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Rp. 227.636.638,-
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 7.270.028.802,-
Jumlah		Rp.14.589.306.519,-

Setelah APBD Perubahan, alokasi anggaran untuk belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan baik untuk belanja program prioritas dan program penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Jumlah anggaran untuk belanja program prioritas dan untuk program penunjang adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Program Prioritas dan Program Penunjang
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Setelah APBD Perubahan)
Tahun Anggaran 2022

No	Tahun Anggaran	Rincian Anggaran		Jumlah
		Program Prioritas	Program Penunjang	
1	2	3	4	5
1	2022	Rp. 10.841.232.398,-	Rp. 7.803.961.210,-	Rp. 18.645.193.608,-

Rincian alokasi anggaran menurut sasaran strategis setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Menurut Sasaran Strategis (setelah APBD Perubahan) Tahun Anggaran 2022

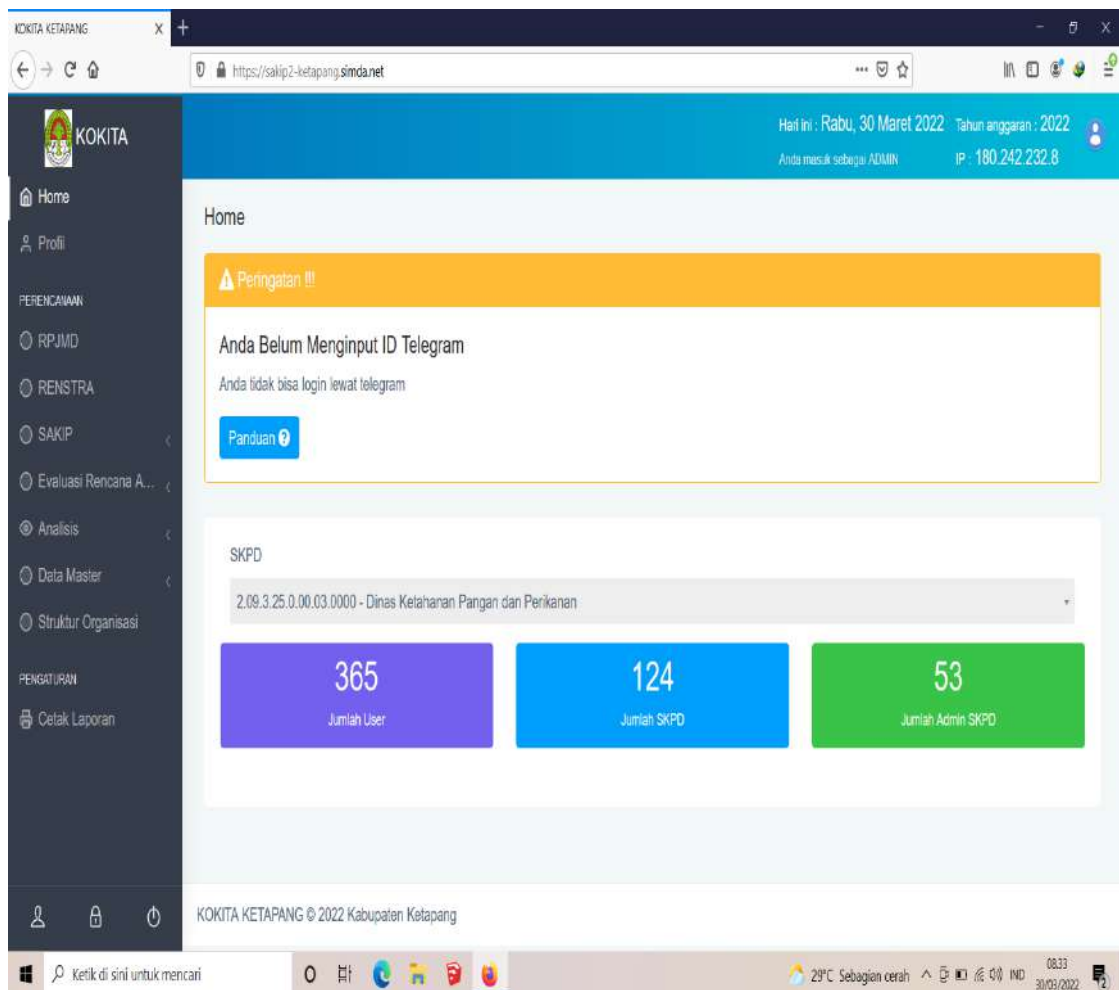
No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Rp. 2.388.068.118,-
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Rp. 4.378.292.159,-
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Rp. 4.040.236.263,-
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Rp. 34.635.858,-
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 7.803.961.210,-
Jumlah		Rp. 18.645.193.608,-

Jika dibandingkan alokasi anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis sebelum perubahan dengan setelah perubahan APBD, maka peningkatan anggaran yang signifikan adalah untuk mendukung sasaran strategis *“Meningkatnya ketahanan pangan, Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan Meningkatkan produksi perikanan budidaya”*, sementara untuk mendukung sasaran strategis *“Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan”* justru mengalami penurunan setelah APBD Perubahan. Terkait dengan hal ini maka pada tahun anggaran 2023, Program dan Kegiatan untuk mendukung meningkatnya kualitas produksi perikanan harus tetap menjadi prioritas.

2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selama tahun 2022 sudah mulai menerapkan teknologi informasi dengan nama aplikasi **"KOKITA"** yang disediakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Adapun tahapan pengukuran kinerja dimulai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rencana Aksi Kinerja setelah DPA ditetapkan. Kemudian dilakukan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja serta Evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja) setiap triwulan. Sistem tersebut adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar 1
Aplikasi Sistem Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau ketidakberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam laporan kinerja perangkat daerah melalui pengukuran kinerja atas perencanaan dan perjanjian kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022 (Renstra 2021-2026)

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja utama daripada sasaran strategis. Perhitungan pencapaian sasaran, memperhatikan karakteristik indikator, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin buruk, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Memperhatikan karakteristik seluruh indikator kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang, maka sifat indikatornya termasuk dalam kategori yang bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja yang dijelaskan pada sub bagian ini adalah capaian kinerja utama yang telah diperjanjikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Kepala Daerah pada awal tahun 2022 setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan. Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang ditetapkan adalah dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah untuk Misi ke-5 (lima) dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yaitu “*Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat*” untuk sasaran strategisnya yaitu “*Meningkatnya pertumbuhan ekonomi*” dengan indikator kinerja utama adalah “*Laju Pertumbuhan Ekonomi*” dan sasaran strategis “*Meningkatnya Kedaulatan Pangan*” dengan indikator kinerja utama yaitu “*Indeks Ketahanan Pangan*”.

Sebelum menguraikan capaian kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022, pada tabel berikut ini ditampilkan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis untuk jangka menengah sesuai dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 yaitu:

Tabel. 3.1
Target Kinerja Sasaran Strategis Jangka Menengah
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	Hasil Perhitungan Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional	84,78	86,73	87,64	87,96	88,84	88,97
		Indeks keterjangkauan	Hasil Perhitungan Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional	81,80	82,32	83,43	83,85	84,74	84,87
		Indeks pemanfaatan	Hasil Perhitungan Kementerian Pertanian/Badan Pangan Nasional	60,19	61,43	62,44	62,56	63,44	63,88
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dalam 1 Tahun (Ton)	23.365,54	24.428,05	26.648,78	28.869,52	31.090,24	33.310,98
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dalam 1 Tahun (Ton)	21.316,90	20.787,93	22.866,73	25.153,40	27.668,74	30.435,61
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	Jlh Produk Olahan Perikanan yg Bersertifikat dibagi Total Olahan Perikanan di kali 100%	10%	11%	11%	12%	12%	12%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP	Nilai Reformasi Birokrasi DKPP	Hasil Penilaian Tim Review RB Kabupaten	3,48 (D)	12 (C)	17 (C)	20 (CC)	21,8 (B)	23 (B)

Berdasarkan formulasi perhitungan yang telah dijelaskan pada tabel di atas maka hasil pengukuran untuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.2. berikut ini.

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	Angka	86,73	84,22	97,11
		Indeks keterjangkauan	Angka	82,32	83,30	101,19
		Indeks pemanfaatan	Angka	61,43	60,38	98,29
	Indeks Ketahanan Pangan		Angka	76,80	74,41	96,89
2	Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	24.428,05	25.730	105,33
3	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	20.787,93	16.377,15	78,78
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	%	11%	8,25%	75,0

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja utama dari sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang ke-1 (satu) yaitu "*Meningkatnya ketahanan pangan*" mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama. Capaian indikator kinerja utama tahun 2022 berdasarkan hasil perhitungan Badan Pangan Nasional yang sudah dirilis secara resmi, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator kinerja utama tersebut hanya satu indikator yang baru mencapai target yaitu **Indeks Keterjangkauan** dengan skor 83,30 dari target 82,32 atau 101,19%. Untuk 2 (dua) indikator kinerja lainnya yaitu **indeks ketersediaan**, capaiannya adalah sebesar 84,22 dari target sebesar 86,73 atau **97,11%**, kemudian capaian kinerja untuk indikator **Indeks**

Pemanfaatan adalah 60,38 dari target sebesar 61,43 atau 98,29%. Dengan demikian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang adalah 74,41 dari target 76,80 atau 96,89%. Dengan skor IKP sebesar 74,41 tersebut, pada tahun 2022 Kabupaten Ketapang menduduki posisi **urutan ke-5** (lima) tertinggi di Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kayong Utara dan Mempawah.

Capaian kinerja untuk sasaran ke-2 (dua) yaitu **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap”** dengan indikator kinerja yaitu **“Jumlah produksi perikanan tangkap”**, tahun 2022 adalah sebesar **25.730 ton** dari target sebesar **24.428,05 ton** atau **105,33%**. Sementara capaian kinerja untuk sasaran ke-3 (tiga) **“Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”** dengan indikator **“Jumlah produksi perikanan budidaya”** hanya tercapai sebesar **16.377,15 ton** dari target sebesar **20.787,93 ton**. Dengan demikian tingkat capaian kerjanya hanya **78,78%**.

Capaian kinerja untuk sasaran ke-4 (empat) **“Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan”** dengan indikator kinerja utama yaitu **“Produk Perikanan yang Bersertifikat”**, pada tahun 2022 belum tersedia karena anggaran untuk mendukung capaian kinerja utama yang ke-4 ini sangat minim sehingga kegiatannya hanya baru berupa biaya pelatihan kepada kelompok usaha olahan perikanan skala mikro dan kecil dan biaya administrasi kegiatan. Dengan demikian maka capaian kerjanya masih **8,25%** dari target **11%**.

Selanjutnya capaian kinerja dalam rangka mendukung Misi ke-1 (satu) yaitu untuk **“Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik”** dengan sasaran strategis **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan”** dengan indikator kerjanya yaitu **“Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang”**, pada tahun 2022 baru mencapai nilai **3,86** atau nilai **D** dari target **12** atau nilai **C**.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dengan kabupaten tetangga di Provinsi Kalimantan Barat, maka gambaran

perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang
dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Ketapang	Kayong Utara	Kubu Raya
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	84,22	91,89	78,00
		Indeks keterjangkauan	83,30	85,73	93,15
		Indeks pemanfaatan	60,38	54,36	44,82
2	Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	25.730	21.735	26.239
3	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	16.377	357,14	4.310,49
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	8,25%	---	---

Keterangan : Kabupaten Kubu Raya data Tahun 2021 dan KKU Semester I Tahun 2022 dan Proyeksi Semester II

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat digambarkan bahwa untuk indikator indeks ketahanan pangan (IKP) dari aspek indeks ketersediaan nilai Kabupaten Ketapang tahun 2022 masih di bawah Kabupaten Kayong Utara dan di atas Kabupaten Kubu Raya. Untuk indeks keterjangkauan posisi Kabupaten Ketapang paling rendah dibandingkan 2 kabupaten lainnya dengan skor nilai hanya **83,30**. Selanjutnya untuk indeks pemanfaatan posisi Kabupaten Ketapang paling tinggi dari kabupaten tetangga lainnya, dengan skor nilai **60,38**.

Kemudian untuk jumlah produksi perikanan tangkap, Kabupaten Ketapang masih di bawah jumlah produksi Kabupaten Kubu Raya dan di atas Kabupaten Kayong Utara. Tetapi untuk capaian jumlah produksi perikanan budidaya posisi Kabupaten Ketapang berada di atas Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya. Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya Provinsi Kalimantan Barat merupakan akumulasi dari jumlah produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya se-kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk capaian persentase produk perikanan yang bersertifikat Kabupaten Ketapang tahun 2022 masih 8,25% dari target 11%. Selanjutnya jika dibandingkan antara capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang dengan capaian kinerja Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, khususnya untuk indikator kinerja yang dapat diperbandingkan dari turunan indikator **Indeks Ketahanan Pangan** yaitu **Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan dan Indeks Pemanfaatan** maka posisi capaian kinerja Kabupaten Ketapang Tahun 2022 berada di atas nilai Provinsi Kalimantan Barat dan Nilai secara Nasional.

Untuk jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya tidak dapat dibandingkan karena sifat datanya merupakan data kumulatif dari penjumlahan angka produksi perikanan baik untuk jumlah produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat termasuk produksi perikanan Kabupaten Ketapang, dan untuk angka nasional merupakan penjumlahan secara kumulatif dari seluruh provinsi termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Untuk gambaran capaian kinerja dari sasaran strategis Kabupaten Ketapang dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Ketapang dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)	Ketapang	Kalbar	Nasional
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks ketersediaan	84,22	76,21	50,90
		Indeks keterjangkauan	83,30	86,33	81,50
		Indeks pemanfaatan	60,38	56,29	46,30
2	Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	25.730	206.520,04	1.901.565
3	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	16.377	83.152,04	3.995.742
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	8,25%	---	---

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah dalam rangka mendukung untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ke-5 (lima) yaitu “Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat” dan ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik”, melalui penetapan 3 (tiga) tujuan yaitu:

- 1. Meningkatnya kedaulatan pangan ;**
- 2. Meningkatnya Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan; dan**
- 3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Menopang Pelayanan Publik.**

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut di atas telah ditetapkan melalui pencapaian 5 (lima) sasaran strategis yaitu:

- 1. Meningkatnya ketahanan pangan;**
- 2. Meningkatnya produksi perikanan tangkap;**
- 3. Meningkatnya produksi perikanan budidaya;**
- 4. Meningkatnya kualitas produksi perikanan; dan**
- 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.**

Untuk mencapai masing-masing sasaran strategis tersebut di atas, pada tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan 7 (tujuh) program utama dan 1 (satu) Program Penunjang yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;**
- 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;**
- 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;**
- 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan;**
- 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;**
- 6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;**
- 7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan**
- 8. Program Penunjang Urusan Pememrintahan Daerah Kabupaten/Kota**

3.2.1 Sasaran ke -1: “Meningkatnya Ketahanan Pangan”

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi 270,2 juta penduduk Indonesia, sehingga menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam **Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SGDs*)** yaitu ***Menghilangkan kelaparan (zero hunger) pada tahun 2030.***

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk **Indeks Ketahanan Pangan (IKP)** yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Sembilan indikator yang digunakan dalam menentukan IKP yang merupakan turunan dari 3 (tiga) pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada:

1. hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global;
2. tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi;
3. keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan
4. ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota/provinsi dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan.

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebihdari 65 persen terhadap total pengeluaran;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*); dan
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Sembilan indikator tersebut di atas masing-masing dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek ketahanan pangan dengan bobot yang telah ditetapkan berdasarkan keahlian (*expert judgement*) yaitu sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Bobot Indikator Ketahanan Pangan untuk Kabupaten dan Provinsi
Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah	0,30
Sub Total		0,30
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,15
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
Sub Total		0,30
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,05
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,05
8.	Persentase balita <i>stunting</i>	0,05
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,10
Sub Total		0,40

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka untuk sasaran strategis yang ke-1 yaitu untuk menilai "*Meningkatnya ketahanan pangan*" capaian kinerjanya diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu:

1. Indeks Ketersediaan;
2. Indeks keterjangkauan; dan
3. Indeks pemanfaatan.

3.2.1.1. Indeks Ketersediaan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan **ketersediaan pangan** adalah kondisi

tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional dan/atau daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan, maka aspek ketersediaan pangan dapat dipenuhi baik dari hasil produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

Salah satu aspek dalam menilai indeks ketahanan Pangan pada tingkat Kabupaten adalah dengan menilai **Indeks Ketersediaan** pangan. Indeks ketersediaan diukur dengan turunan indikator yaitu *“Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih”*.

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih adalah untuk komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah. Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan. Sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data yang digunakan untuk menentukan produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah menggunakan angka tetap 2021 dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka ditetapkan salah satu indikator kinerja yang akan diukur untuk mencapai sasaran strategis *“Meningkatnya ketahanan pangan”* adalah dengan menilai **indeks ketersediaan**. Penilaian capaian kinerja untuk mengetahui indeks ketersediaan di Kabupaten Ketapang dihitung dengan menggunakan rumus/formula yang secara baku oleh **Badan Pangan Nasional** sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Meta Indikator/ Rumus untuk Menghitung
“Indeks Ketersediaan”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	Hasil Perhitungan Badan Pangan Nasional setiap tahun terhadap Bobot Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan formula tersebut di atas maka Badan Pangan Nasional telah merilis data kinerja dari sasaran strategis yang ke-1 yaitu “Meningkatnya Ketahanan Pangan” untuk indikator kinerja utama (IKU) yang pertama yaitu *Indeks Ketersediaan*, kemudian dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Utama
“Indeks Ketersediaan” Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra

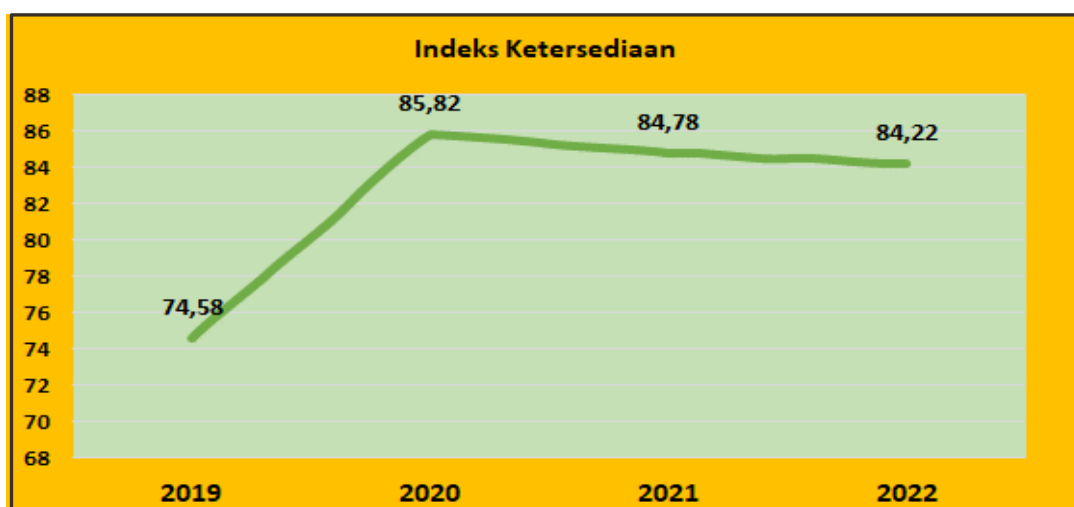
No	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2021	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Ketersediaan	84,78	86,73	84,22	97,11%	88,97	94,66%

Selanjutnya jika dilihat dari capaian kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja utama “Indeks Ketersediaan” mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022, maka capaiannya menunjukkan penurunan.

Capaian kinerja pada tahun 2020 merupakan pencapaian kinerja yang paling tinggi yaitu dengan skor **85,82**.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini ditampilkan capaian kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Pangan” untuk indikator kinerja yang pertama yaitu “*Indeks Ketersediaan*” sebagai berikut:

Gambar 3.1
Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
“Indeks Ketersediaan” Tahun 2019-2022



Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan indeks ketersediaan pangan di Kabupaten Ketapang adalah:

1. Belum terpenuhinya anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Cadangan pangan yang dimaksud disini adalah beras sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan oleh masyarakat secara mandiri dan yang dijual ke perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang yang akan mempengaruhi kapasitas produksi pertanian dari tahun ke tahun.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang serta masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan;
4. Masih kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;
5. Belum optimalnya produksi hasil pertanian masyarakat khususnya padi akibat adanya gagal panen karena hama dan faktor perubahan cuaca ekstrim sehingga berdampak kepada stok cadangan pangan pada lumbung pangan masyarakat.
6. Belum optimalnya kondisi infrastruktur pendukung distribusi pangan dan ketersediaan toko tani yang belum berkembang.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks ketersediaan adalah:

1. Mengusulkan anggaran untuk pengadaan cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan atau target yang telah ditetapkan melalui APBD Kabupaten Ketapang.
2. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat melakukan upaya-upaya peningkatan produksi pertanian baik melalui intensifikasi atau ekstensifikasi khususnya padi pada wilayah-wilayah yang sangat potensial.

3. Melakukan koordinasi untuk pengaturan pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan atau kegiatan lainnya terutama bagi daerah yang sangat potensial untuk lahan pertanian termasuk untuk pengembangan sentra produksi pangan/food estate.
4. Melaksanakan Kampanye Pola Konsumsi untuk Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan *Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman* (B2SA).
5. Melakukan koordinasi kepada OPD terkait untuk peningkatan /perbaikan jalur distribusi pangan dan Pengembangan Toko Tani Indonesia di Kabupaten Ketapang.

3.2.1.2. Indeks Keterjangkauan

Aspek yang kedua dalam menilai Indeks Ketahanan Pangan pada tingkat Kabupaten dan Provinsi adalah dengan menilai Indeks Keterjangkauan Pangan. Indeks keterjangkauan diuraikan dengan indikator yang ditetapkan bobotnya secara keahlian menjadi 3 (tiga) indikator penentu yaitu:

a. **Persentase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan**

Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Data Susenas 2021, BPS.

b. **Persentase Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih dari 65 Persen Terhadap Total Pengeluaran.**

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga.

Teori *Engel* menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2021, BPS.

c. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan dengan mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Karena itu, ketersediaan tenaga listrik dijadikan salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik bersumber dari Susenas 2021, BPS.

Berdasarkan penjelasan di atas, indikator kinerja ke-2 yang diukur untuk menilai capaian sasaran strategis “*Meningkatnya ketahanan pangan*” adalah dengan cara menilai **indeks keterjangkauan**. Penilaian capaian kinerja untuk indeks keterjangkauan dihitung menggunakan rumus/formula yang secara baku oleh **Badan Pangan Nasional** sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Meta Indikator/ Formulasi untuk menentukan “**Indeks Keterjangkauan**”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Meta Indikator (Rumus)
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Keterjangkauan	Hasil Perhitungan Badan Pangan Nasional setiap tahun terhadap 3 indikator sesuai Bobot masing-masing.

Berdasarkan formula tersebut di atas, Badan Pangan Nasional dalam laporannya telah merilis data Indeks keterjangkauan sebagai capaian kinerja

dari sasaran strategis yang ke-1 yaitu “Meningkatnya Ketahanan Pangan” untuk indikator kinerja yang kedua yaitu *Indeks Keterjangkauan*, kemudian dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

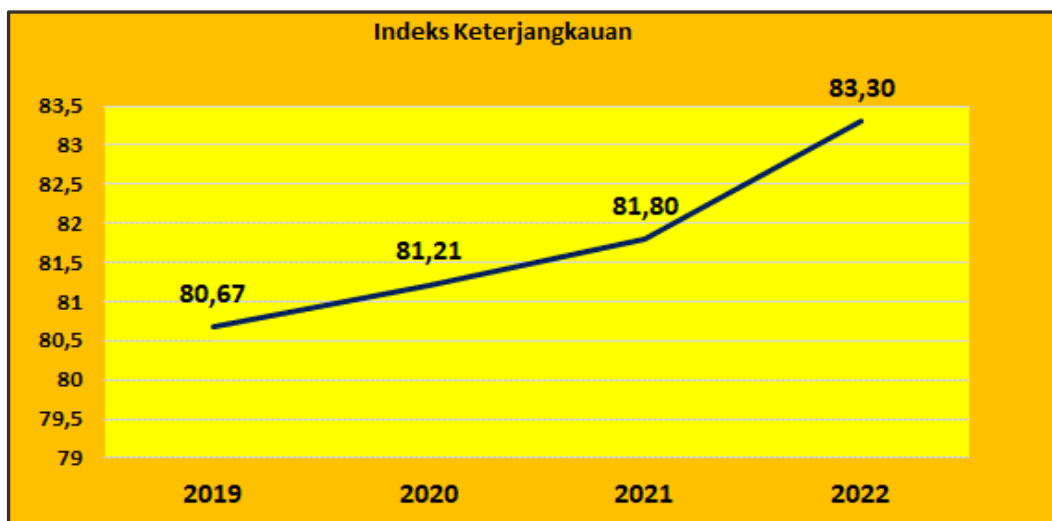
Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Utama
“Indeks Keterjangkauan” Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Baseline 2021	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Keterjangkauan	81,80	82,32	83,30	101,19%	84,87	98,15%

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja yang ke-2 yaitu “Indeks Keterjangkauan” mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan setiap tahun. Capaian kinerja pada tahun 2022 meningkat 2 digit jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari **81,80** meningkat menjadi **83,30**.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini ditampilkan capaian kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya Ketahanan Pangan” untuk indikator kinerja yang kedua yaitu “Indeks Keterjangkauan” sebagai berikut:

Gambar 3.2
Grafik Capaian Indikator Kinerja “Indeks Keterjangkauan”
Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2022



Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Indeks Keterjangkauan adalah:

1. Masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang. Hingga akhir tahun 2022 data dari BPS Kabupaten Ketapang menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ketapang masih sebesar 9,39% turun dari 10,13% pada tahun 2021. Tetapi posisi Kabupaten Ketapang masih masuk dalam kelompok 3 tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak.
2. Masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita rata-rata keluarga karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan banyaknya proporsi penduduk dalam usia angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan sehingga berpengaruh kepada tingkat pengeluaran keluarga untuk konsumsi pangan yang harus dikeluarkan atau dibelanjakan untuk kebutuhan pangan keluarga.
3. Terbatasnya ketersediaan jaringan listrik di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang, mempengaruhi aktivitas pekerjaan yang berdampak kepada kegiatan ekonomi masyarakat termasuk terhadap penyimpanan bahan pangan khususnya bahan pangan yang tidak tahan lama. (harus disimpan di tempat khusus seperti lemari pendingin).

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks Keterjangkauan sesuai faktor-faktor penentunya adalah:

1. Melaksanakan koordinasi kepada stakeholder dalam rangka menyusun program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
2. Melaksanakan koordinasi dan upaya peningkatan pendapatan keluarga sesuai kewenangan masing-masing pihak.
3. Melaksanakan koordinasi kepada pihak terkait untuk mendorong peningkatan kualitas layanan ketersediaan jaringan listrik terutama kepada wilayah-wilayah atau desa yang belum tersedia jaringan listrik selama 24 jam secara terus menerus.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah, terhadap peningkatan dan/atau perbaikan infrastruktur.

3.2.1.3. Indeks Pemanfaatan

Aspek yang ketiga yang menjadi penentu Indeks Ketahanan Pangan pada tingkat Kabupaten dan Provinsi adalah dengan menilai *Indeks Pemanfaatan*. Indeks Pemanfaatan ditentukan dari capaian indikator yang ditetapkan bobotnya secara keahlian meliputi 5 (lima) indikator penentu yaitu:

a. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Di Atas 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas 2021, BPS.

b. Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, daerah dengan akses terhadap air bersih rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi (Sofianti 2010). Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat

memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Kavosi et al. 2014). Sumber data berasal dari data Susenas 2021, BPS.

c. Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk.

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010; Sofiati 2010). Data tenaga kesehatan bersumber dari Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2021, Kementerian Kesehatan.

d. Persentase Balita Dengan Tinggi Badan Di Bawah Standar (Stunting).

Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan (Pemprov NTT *et al.* 2015). Data stunting diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Kementerian Kesehatan.

e. Angka Harapan Hidup Pada Saat Lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik

dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari Data Susenas 2021, BPS.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka ditetapkan indikator kinerja ke-3 yang diukur untuk mencapai sasaran strategis “*Meningkatnya ketahanan pangan*” adalah dengan menilai indeks pemanfaatan. Penilaian capaian kinerja untuk mengetahui indeks pemanfaatan dihitung dengan menggunakan rumus/formula yang secara baku oleh Badan Pangan Nasional sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Meta Indikator/ Formulasi untuk Menentukan
“Indeks Pemanfaatan”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Pemanfaatan	Hasil Perhitungan Badan Pangan Nasional setiap tahun terhadap 5 indikator turunan indeks Pemanfaatan sesuai Bobot masing-masing.

Berdasarkan formula pada tabel 3.10 tersebut di atas maka Badan Pangan Nasional dalam laporannya telah merilis data kinerja dari sasaran strategis yang ke-1 yaitu “*Meningkatnya Ketahanan Pangan*” untuk indikator kinerja yang ketiga yaitu *Indeks Pemanfaatan* sebagaimana pada tabel di bawah ini, kemudian dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Indikator Kinerja Utama
“Indeks Pemanfaatan” Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Baseline 2021	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pemanfaatan	60,19	61,43	60,38	98,29%	63,88	94,52%

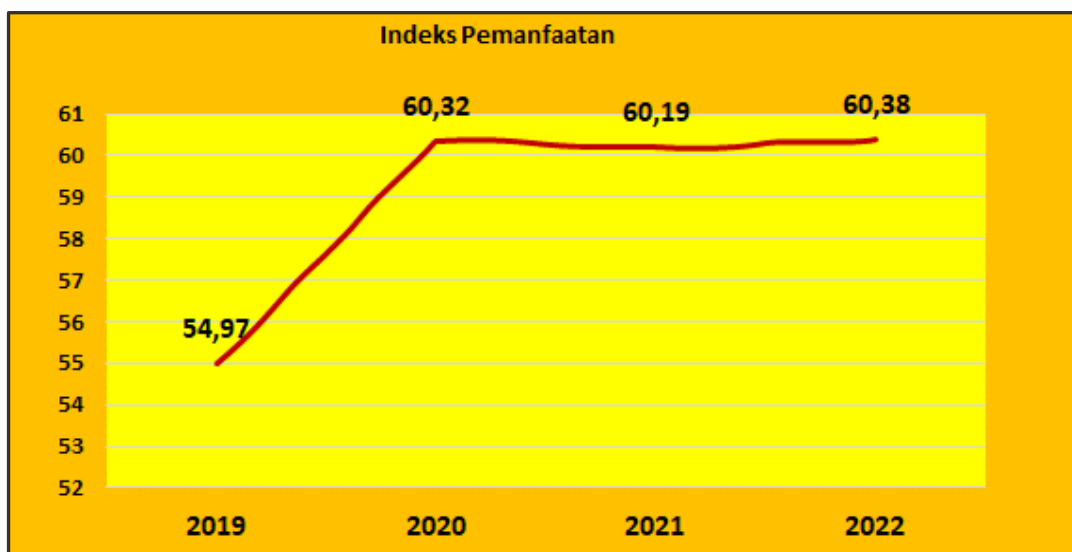
Tingkat capaian kinerja sasaran strategis untuk indikator kinerja yang ke-3 (tiga) yaitu “**Indeks Pemanfaatan**” dari tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat cukup signifikan sebesar 6 digit yaitu dari skor **54,97** naik menjadi **60,32**.

Kemudian dari tahun 2020 hingga tahun 2022, capaian kinerjanya relative stagnan atau kurang lebih sama dengan skor indeks pemanfaatan di kisaran **60,32** menjadi **60,38**.

Capaian kinerja pada tahun 2022 relatif tidak meningkat juga jika dibandingkan dengan tahun 2021, karena hanya meningkat sedikit yaitu dari skor **60,19** menjadi **60,38**.

Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini ditampilkan capaian kinerja dari sasaran strategis “**Meningkatnya Ketahanan Pangan**” untuk indikator kinerja yang ketiga yaitu “**Indeks Pemanfaatan**” sebagai berikut:

Gambar 3.3
Grafik “**Indeks Pemanfaatan**”
Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2022



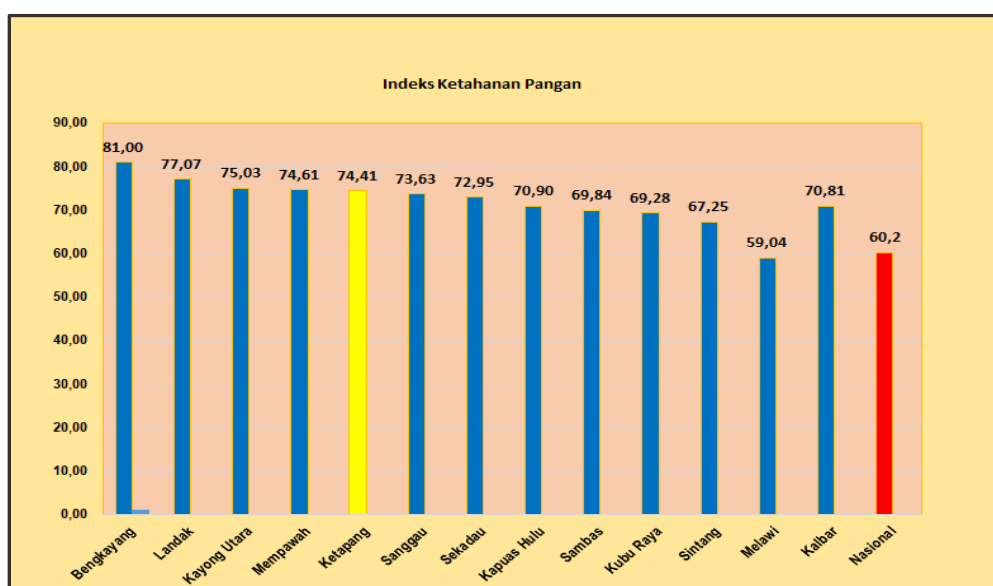
Selanjutnya, berdasarkan komposite dari tiga aspek yang telah ditentukan yaitu indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan dapat ditentukan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Ketapang dari tahun 2019-2022 sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut ini.

Gambar 3.4
 Grafik Indeks Ketahanan Pangan
 Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2022



Berdasarkan grafik di atas Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020, tetapi mulai tahun 2020-2022 peningkatannya relatif lambat karena hanya naik 0,17 poin dari nilai 74,24 menjadi 74,41. Namun jika dibandingkan dengan angka IKP beberapa kabupaten, posisi Kabupaten Ketapang masuk pada urutan tertinggi ke-5 (lima) dan di atas IKP Provinsi Kalimantan Barat dan IKP Nasional sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.5
 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ketapang
 dengan Kabupaten Lain, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2022



Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Indeks Pemanfaatan Pangan adalah:

1. Masih belum optimalnya cakupan air bersih yang memenuhi syarat bagi rumah tangga di Kabupaten Ketapang.
2. Belum optimalnya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dan Pendidikan vokasi termasuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pangan dan gizi seimbang.
3. Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan di Kabupaten Ketapang terutama di daerah-daerah terpencil yang aksesnya sulit di beberapa kecamatan.
4. Masih adanya desa-desa stunting yang perlu intervensi program secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Indeks Pemanfaatan sesuai faktor penentunya adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan Upaya Program Penuntasan wajib belajar 9 tahun termasuk Program Paket A, B dan C dan Pendidikan Vokasi bagi masyarakat yang belum tuntas wajar 9 tahun.
2. Melaksanakan koordinasi kepada OPD terkait untuk melakukan upaya peningkatan cakupan akses air bersih termasuk jaringan PDAM kepada masyarakat terutama wilayah-wilayah yang cakupannya rendah.
3. Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pemerataan distribusi dan penambahan tenaga Kesehatan di wilayah yang tenaga kesehatannya sangat terbatas.
4. Melakukan koordinasi dengan seluruh OPD terkait serta mengusulkan anggaran untuk kegiatan sesuai kewenangan dalam rangka penanggulangan stunting di Kabupaten Ketapang.

3.2.2 Sasaran ke-2: “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap”

Perikanan Tangkap merupakan usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air

lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) *yang tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia*. Perikanan tangkap sebagian besar dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen, termasuk juga yang ada di sungai danau dan danau.

Ada berbagai cara untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap sehingga bisa mencapai target yang diinginkan, selain gencar memberantas habis praktik *illegal fishing*, yaitu dengan cara:

1. Pembagian Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan;
2. Pembagian Bantuan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Angkut Ikan;
3. Pelatihan/Bimbingan Teknis kepada Nelayan;
4. Penataan Perizinan Usaha Perikanan (SIPI); dan
5. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Modern.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk menjadi salah satu pemasok hasil perikanan di pasar dunia. Potensi tersebut mencakup letak geografis yang relatif dekat dengan pasar dunia dan ketersediaan lahan yang luas dalam pengembangan industri perikanan, dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Ketapang. Sektor perikanan ini hendaknya mendapat perhatian yang lebih lagi, terutama dalam hal menjaga dan meningkatkan mutu hasil perikanan yang dihasilkan. Produksi perikanan tangkap di wilayah lautan Provinsi Kalimantan Barat ke bagian selatan meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Sedangkan ke arah utara meliputi Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Sambas.

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Ketapang saat ini sangat besar seperti halnya kabupaten lain. Namun potensi sektor perikanan tangkap yang sangat besar tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap tingkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Ketapang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja terhadap sasaran strategis **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap”** maka harus dilakukan berbagai upaya seperti pemberian bantuan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan beserta sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada nelayan. Hal lain yang harus terus dilakukan adalah peningkatan kapasitas nelayan dan pemberian subsidi seperti BBM Solar agar kegiatan melaut atau aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan semakin lancar, dengan demikian diharapkan jumlah produksi perikanan akan semakin meningkat serta upaya peningkatan mutu pengelolaan TPI yang tersedia saat ini di Ränge Sentap Kecamatan Delta Pawan.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menilai capaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap”** diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu **“Jumlah Produksi perikanan tangkap”** selama 1 tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada periode yang sama.

Adapun formula untuk menghitung jumlah produksi perikanan tangkap dalam menentukan capaian sasaran strategis **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap”** adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Meta Indikator/Formulasi untuk Menentukan
“Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Total jumlah Produksi Perikanan Tangkap termasuk produksi perikanan dari wilayah perairan umum (Sungai) dalam 1 Tahun dibagi Target Tahunan X 100%

Total produksi perikanan tangkap termasuk hasil produksi perikanan dari wilayah perairan umum Kabupaten Ketapang tahun 2022 adalah sebanyak **25.730 ton**. Target produksi perikanan tangkap tahun 2022 adalah sebesar **24.428,05 ton** maka capaian indikator kinerja utama untuk **“Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”** adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”
Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra

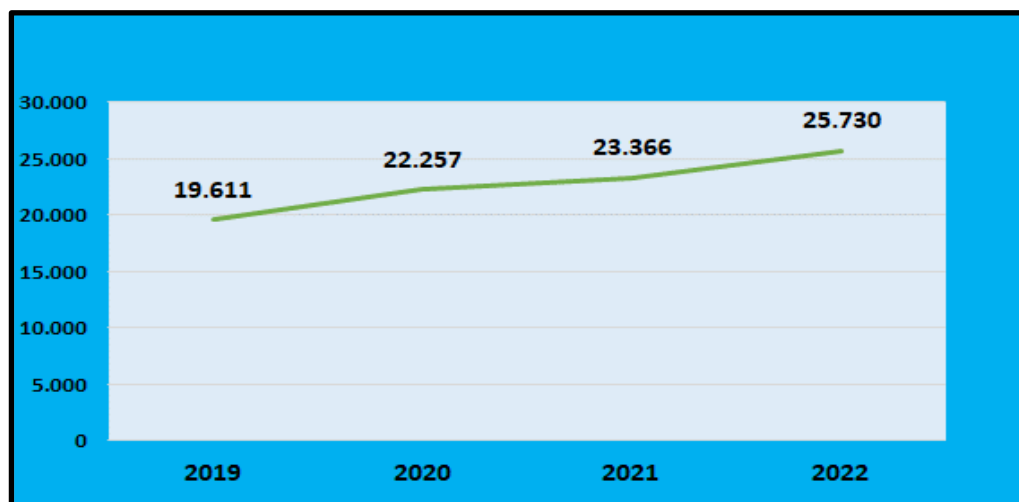
No	Indikator Sasaran	Baseline 2021	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	23.366	24.428,05	25.730	105,33%	33.311	77,24%

Capaian kinerja untuk *jumlah produksi perikanan tangkap* tahun 2022 *sudah mencapai target*, kemudian hasil produksi dari tahun 2019-2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil ini berbanding lurus dengan potensi perikanan tangkap yang besar di Kabupaten Ketapang termasuk di wilayah perairan umum pada daerah aliran Sungai Pawan dan Sungai Pesaguan sebagaimana ditampilkan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel. 3.14
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” Tahun 2019-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun											
			2019			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	23.301	19.611	84,16	23.767	22.257	93,65	24.243	23.366	96,38	24.428,05	25.730	105,33

Gambar 3.6
Grafik “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap”
Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2022



Potensi produksi perikanan tangkap termasuk dari wilayah perairan umum di Kabupaten Ketapang diprediksi masih jauh lebih besar dari yang tercatat selama tahun 2022, karena kemungkinan masih banyak yang belum melaporkan terutama di wilayah pulau pulau kecil yang jauh termasuk aktivitas hasil penangkapan ikan dari nelayan kecil.

Sebagai perbandingan dengan kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Kayong Utara sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.3 sebelumnya, jumlah produksi perikananannya tidak terlalu jauh berbeda dengan Kabupaten Ketapang walaupun lebih kecil sedikit padahal luas wilayah laut serta potensi Kabupaten Ketapang jauh lebih besar. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Kubu Raya, produksi perikanan tangkap Kabupaten Ketapang masih lebih kecil.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah:

1. Masih kurangnya anggaran untuk pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Ketapang termasuk sarana pendukung untuk kegiatan penangkapan ikan seperti kapal motor dan mesin.
2. Terbukanya lapangan pekerjaan di sektor perkebunan dan pertambangan sehingga para nelayan cenderung beralih profesi menjadi pekerja perkebunan karena penerimaan hasil pekerja sektor perkebunan lebih cepat dibandingkan menjadi nelayan.
3. Masih terjadinya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penyetruman di wilayah perairan umum (sungai).
4. Masih lemahnya kelengkapan administrasi perizinan kapal nelayan sehingga berpengaruh kepada ketentuan pemberian subsidi seperti BBM Solar dan hal ini berpengaruh pada aktivitas melaut para nelayan.
5. Sulitnya nelayan mendapatkan BBM Solar Bersubsidi pada waktu-waktu tertentu sehingga frekuensi kegiatan melaut untuk menangkap ikan menjadi kurang.

6. Belum optimalnya fungsi layanan TPI sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap adalah:

1. Pengadaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan melalui DAK dan APBD Kabupaten Ketapang.
2. Memberikan bantuan, pendampingan dan penyuluhan tentang penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan untuk menjaga sumber daya perikanan agar tetap terjaga.
3. Membangun sarana prasarana penangkapan ikan seperti steigher untuk kapal nelayan, dan perbaikan layanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
4. Pembenahan administrasi perizinan kapal nelayan agar tidak menimbulkan masalah dalam aktivitas untuk menangkap ikan di laut.
5. Peningkatan mutu pelayanan untuk pemberian Rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan sehingga aktivitas melaut untuk menangkap ikan berjalan dengan lancar.
6. Melaksanakan koordinasi dengan aparat untuk pengawasan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan racun dan penyetruman sesuai kewenangan kabupaten.
7. Memberikan informasi terkait waktu kondisi cuaca ekstrim kepada nelayan agar dapat berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mendapatkan informasi *real time* tentang prakiraan cuaca sehingga meningkatkan efisiensi dari aktivitas penangkapan ikan di laut.

3.2.3 Sasaran ke-3: “Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”

Potensi sektor perikanan budidaya di Indonesia termasuk Kabupaten Ketapang sangat besar. Bahkan, potensi produksinya masih bisa ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi. Sebagai gambaran, produksi perikanan budidaya Indonesia saat ini berada di posisi nomor dua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Produksi ikan budidaya Tiongkok sebesar 68,42

juta ton per tahun. Sementara Indonesia di posisi kedua dengan 15,89 juta ton. Padahal panjang garis pantai Tiongkok yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya hanya 14.500 kilometer, sementara Indonesia panjangnya 99.083 kilometer,”

Untuk Kabupaten Ketapang, produksi perikanan budidayanya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan namun jika dibandingkan dengan potensi yang ada peningkatan tersebut dinilai masih belum maksimal. Potensi sektor perikanan budidaya semestinya masih dapat terus ditingkatkan dari yang ada saat ini.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”** melalui optimalisasi jumlah produksi perikanan budidaya harus terus dilakukan sehingga potensi perikanan budidaya yang besar di Kabupaten Ketapang dapat terus dimanfaatkan dan pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat khususnya kelompok-kelompok pembudidaya ikan karena permintaan pasar dari tahun ke tahun juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan kegiatan perusahaan di sektor perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Ketapang.

Untuk menilai capaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”** diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama yaitu **“Jumlah Produksi perikanan budidaya”** selama 1 tahun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada periode yang sama. Adapun formula untuk menghitung jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Ketapang sebagai indikator kinerja utama dari sasaran strategis **“Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya”** adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Meta Indikator/ Formulasi untuk Menentukan
“Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Total Produksi Perikanan Budidaya dalam 1 Tahun dibagi dengan Target Tahunan X 100%

Sesuai dengan formula di atas, maka dengan total produksi perikanan budidaya Kabupaten Ketapang tahun 2022 sebesar 16.377 ton, maka capaian indikator kinerja untuk “Jumlah produksi perikanan budidaya” dibandingkan dengan target pada tahun yang sama yaitu sebesar 20.788 ton dan dengan target serta capaian akhir tahun Renstra adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja “Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”
Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra

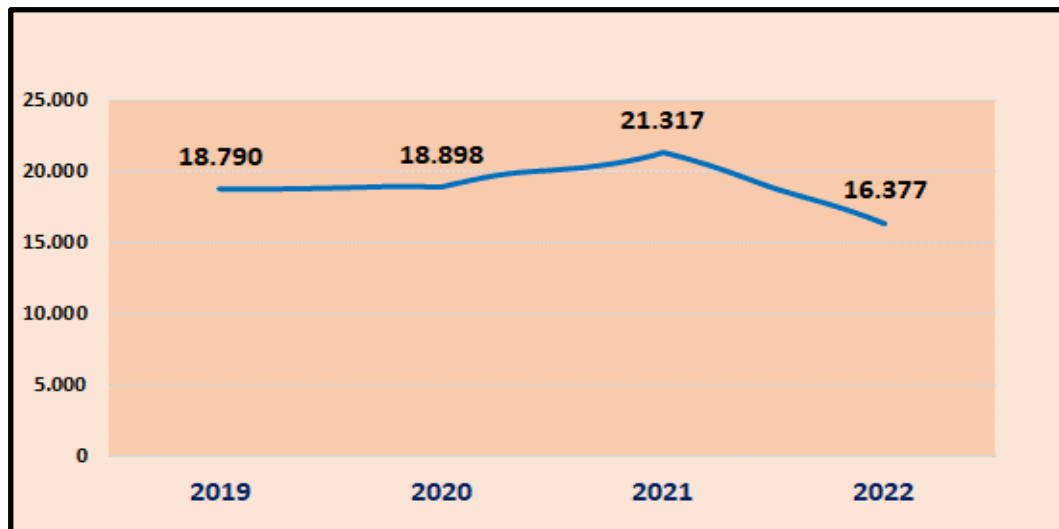
No	Indikator Sasaran	Baseline 2021	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	21.317	20.788	16.377	78,78%	30.436	53,81%

Capaian kinerja untuk *jumlah produksi perikanan budidaya* tahun 2022 belum mencapai target, dan jika dilihat kecenderungan setiap tahun jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2018 hingga akhir tahun 2021 menunjukkan peningkatan setiap tahun namun pada tahun 2022 mengalami penurunan karena adanya bencana banjir pada akhir tahun 2022 yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan budidaya seperti ditampilkan pada tabel 3.17 dan gambar 3.7 berikut ini.

Tabel. 3.17
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
“Jumlah Produksi Perikanan Budidaya”
Tahun 2018-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun											
			2019			2020			2021			2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	18.654	18.790	100,73	19.400	18.898	97,41	20.370	21.316,90	104,65	20.788	16.377,00	78,78

Gambar 3.7
Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama
"Jumlah Produksi Perikanan Budidaya" Kabupaten Ketapang Tahun 2019-2022



Jika dibandingkan dengan Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya, maka posisi jumlah produksi perikanan budidaya Kabupaten Ketapang tahun 2022 lebih besar karena potensi perikanan budidaya di Kabupaten Ketapang memang jauh lebih besar.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah:

1. Masih terbatasnya kapasitas para pelaku pembudidaya ikan karena terbatasnya kegiatan pelatihan perikanan budidaya dan kaji banding ke daerah lain serta kurangnya pelatihan di tempat (*on the job training*) dengan mendatangkan narasumber yang sudah berpengalaman.
2. Belum optimalnya pengelolaan Balai Benih Ikan Budidaya yang ada di Kecamatan Sandai dan Manjau karena keterbatasan SDM yang berkualitas di lapangan serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya.
3. Sulitnya kondisi infrastruktur antar wilayah dalam melakukan pembinaan perizinan dan monitoring secara berkala kepada kelompok-kelompok usaha pembudidaya ikan.

4. Terjadinya kenaikan BBM yang berdampak kepada tingginya harga pakan ikan pabrikan di pasaran mengakibatkan biaya produksi yang semakin besar sehingga berdampak pada produksi perikanan budidaya.
5. Belum terbangunnya komunitas kelompok pembudidaya ikan dan jaringan pemasaran hasil perikanan budidaya dengan baik.
6. Terjadinya bencana banjir akhir Tahun 2022 yang berdampak terhadap jumlah produksi perikanan budidaya.

Alternatif/Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya adalah:

1. Memberikan bantuan pakan ikan kepada kelompok serta upaya peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya ikan melalui kaji banding sehingga pengetahuan dan minat kelompok untuk usaha membudidayakan ikan semakin meningkat terutama di daerah yang potensial untuk pengembangan perikanan budidaya.
2. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku pembudidaya ikan berupa penyuluhan dan pembinaan usaha perikanan budidaya.
3. Perbaiki sarana dan prasarana Balai Benih Ikan dan pengembangan kapasitas petugas balai benih ikan sehingga dapat menghasilkan bibit/benih ikan unggul yang sangat efektif mendongkrak jumlah produksi perikanan budidaya.
4. Mendorong para pelaku perikanan budidaya untuk membangun jejaring hasil perikanan termasuk fasilitasi pemasaran kepada pihak perusahaan perkebunan.
5. Melaksanakan pelatihan bagi kelompok pembudidaya ikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga termasuk kelompok binaan perusahaan yang berminat pada usaha perikanan budidaya.
6. Melaksanakan kegiatan pembelajaran ke kabupaten lain dan kerja sama pengelolaan BBI dengan UPT Kementerian KKP.

5.2.3. Sasaran ke 4 : “Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan”

Sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan merupakan suatu potensi yang dapat dijadikan sebagai modal kehidupan. Potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang besar di Kabupaten Ketapang sangat strategis untuk mendukung upaya sektor perikanan khususnya dalam peningkatan konsumsi ikan yang bermutu. Ini adalah satu aset yang dimiliki daerah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, maka dari itu diperlukan diversifikasi produk yakni salah satu wujud dari penerapan ide-ide kreatif, inovatif, dan aplikatif di masyarakat. Pada intinya diversifikasi merupakan suatu proses pengembangan produk melalui penganekaragaman bentuk, cita rasa dan segala atribut yang melekat pada suatu produk melalui diversifikasi juga merupakan salah satu usaha menjawab ketahanan pangan.

Ikan termasuk bahan pangan yang beresiko tinggi karena sangat mudah rusak, pada suhu ruang 27 derajat celsius hanya bertahan beberapa jam dan mulai mengalami penurunan kualitas setelah dua jam di udara terbuka dan suhu ruang. Pengolahan ikan yang baik meningkatkan mutu produk ikan.

Cara meningkatkan mutu olahan ikan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip **Bersih, Cepat, Cermat dan Dingin (Bercermin)**. Bersih artinya bebas dari kotoran dan tidak tercemar. Cepat maknanya waktu yang singkat dan segera tidak menunda-nunda. Cermat berarti penuh perhatian, teliti, dan hati-hati, Terakhir Dingin yaitu suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh manusia.

Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Produk Pengolahan Ikan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.

Upaya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil menuju UPI

(Unit Pengolahan Ikan) Ber-SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) harus dilaksanakan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan dan informasi kepada para pelaku usaha pengolah hasil perikanan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) agar hasil olahannya bisa terjamin mutu dan keamanannya. Jika tidak ada SKP para pelaku usaha tidak bisa menjual olahannya sehingga diharapkan para pelaku usaha agar semuanya mempunyai sertifikat, kesehatan dan kelayakan tempat usahanya. Melalui kegiatan pembinaan diharapkan dapat semakin mendorong pelaku usaha *home industry* dalam mengolah hasil perikanan untuk menghasilkan produk olahan ikan yang bernilai jual tinggi dan berdaya saing.

Tujuan lain dari Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil adalah untuk memberikan arahan dan informasi kepada kelompok pengolah hasil perikanan untuk mendapatkan sertifikat P-IRT dan Sertifikat Halal, agar hasil olahannya bisa terjamin mutu dan keamanannya, karena sertifikat ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan olahan pangan hasil produksi rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu. Sertifikat P-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, sehingga produk hasil olahan industri rumah tangga khususnya di bidang perikanan bisa secara legal dipasarkan ke masyarakat luas, karena produknya sudah terjamin keamanan mutunya. Demikian juga untuk sertifikat Halal bagi pelaku usaha khususnya bidang perikanan. Dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat menaikkan kepercayaan terhadap kualitas dari suatu produk.

Berbagai produk olahan di Kabupaten Ketapang yang merupakan industri rumah tangga, seperti kerupuk, amplang, terasi udang, dan olahan lainnya sudah di pasarkan ke berbagai daerah. Oleh sebab itu kualitas, desain kemasan, merk, logo, etiket, promosi dan pemasaran mempengaruhi nilai jual produk olahan hasil perikanan di Kabupaten Ketapang.

Berkaitan dengan beberapa uraian dan penjelasan di atas, maka untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan” dinilai dengan menggunakan indikator “*Persentase Produk Perikanan Yang Bersertifikat*” dalam satuan persen. Adapun formula untuk menghitung persentase produk perikanan yang bersertifikat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Meta Indikator/ Formulasi untuk Menentukan
“Persentase Produk Perikanan Yang Bersertifikat”

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Meta Indikator (Rumus)
1	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan Yang Bersertifikat	Jumlah Hasil Olahan Produk Perikanan Yang telah Bersertifikat dibagi dengan Jumlah Seluruh Produk Olahan Hasil Perikanan x 100%.

Berdasarkan formula/rumus perhitungan di atas, maka capaian kinerja dari sasaran strategis yang ke-4 yaitu “*Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan*” tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja
“Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat”
Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra

No	Indikator Sasaran	Baseline 2021	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Produk Perikanan Yang Bersertifikat	NA	11%	8,25%	75,0%	12%	68,75%

Dengan capaian kinerja sebesar 8,25% tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa target produk perikanan yang bersertifikat belum tercapai dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaiannya baru sebesar 68,75%.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Produk Olahan Perikanan yang Bersertifikat adalah :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sehingga kegiatan dan sub kegiatannya belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan.
2. Belum focusnya rincian belanja kegiatan sesuai tujuannya dalam rangka mencapai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
3. Kurangnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi terkait Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan.
4. Terbatasnya bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan bagi kelompok usaha pengolahan ikan.
5. Terbatasnya jumlah peserta untuk mengikuti pelatihan PIRT yang dilaksanakan oleh OPD terkait setiap tahun.
6. Terbatasnya pengetahuan dan wawasan para pelaku usaha pengolahan ikan karena kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan serta monitoring dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Alternatif/Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka meningkatkan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Bersertifikat adalah:

1. Meningkatkan dan refocussing anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi semua pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Skala Mikro dan Kecil sesuai kewenangan kabupaten.
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan kepada Kelompok-Kelompok Usaha Pengolahan Ikan (UPI).
3. Melakukan Pelatihan dan Pembinaan kepada Kelompok Usaha Pengolahan Perikanan skala Mikro dan Kecil agar meningkat pengetahuan dan kesadarannya sehingga kualitas olahan perikanannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan pada akhirnya

akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi karena terjamin kualitasnya.

4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam rangka pelatihan PIRT dan penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) sehingga diperoleh data/informasi yang up to date untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
5. Melaksanakan pembelajaran ke daerah yang telah maju usaha pengolahan ikannya sesuai ketentuan yang berlaku, agar dapat memberikan wawasan dan motivasi yang tinggi bagi pelaku usaha pengolahan perikanan di Kabupaten Ketapang secara bertahap.

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dari APBD Kabupaten Ketapang dalam rangka mencapai 5 (lima) sasaran strategis pada tahun anggaran 2022 adalah **Rp.18.645.193.608,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 16.393.942.102,96,-** atau **87,93%**.

Adapun rincian realisasi anggaran per sasaran strategis pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20
Alokasi dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	86,73	84,22	97,11	2.388.068.118	2.291.260.089	95,95
		Indeks keterjangkauan	82,32	83,30	101,19			
		Indeks pemanfaatan	61,43	60,38	98,29			
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	24.428,05	25.730	105,33	4.378.292.159	3.531.119.588	80,65
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	20.787,93	16.377,15	78,78	4.040.236.263	3.833.914.979	94,89
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	11%	8,25%	75%	34.635.858	33.703.520	97,31
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP	Nilai Reformasi Birokrasi DKPP	12 (C)	3.86 (D)	32,17	7.803.961.210	6.703.943.927	85,90

Berdasarkan tabel 3.20 tersebut di atas, realisasi kinerja dari sasaran strategis "Meningkatnya kualitas produksi perikanan", pada tahun anggaran 2022 masih 8,25% dari target 11%. Anggaran Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan untuk meningkatkan capaian kinerja dari sasaran strategis ini, pada APBD Murni sebenarnya sudah teralokasikan sebesar Rp.227.636.638,- namun pada APBD Perubahan Tahun 2022 oleh Bidang Perikanan Budidaya dilakukan pergeseran Belanja sehingga alokasi hanya sebesar Rp.34.635.858,- dengan realisasi Rp.33.703.520,- atau 97,31%.

Berdasarkan alokasi belanja tersebut, maka anggaran untuk pembinaan dan untuk monitoring serta evaluasi kepada kelompok usaha olahan perikanan masih belum memadai sehingga data capaian kinerja untuk sasaran strategisnya masih 75,0%.

Selanjutnya dari realisasi anggaran menurut sasaran strategis tersebut di atas, pada tabel berikut ini ditampilkan analisis efisiensi anggaran dengan cara membandingkan antara capaian kinerja sasaran strategis dengan persentase penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.21
Analisis Efisiensi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketersediaan	97,11	95,95	-
		Indeks keterjangkauan	101,19		
		Indeks pemanfaatan	98,29		
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	105,33	80,65	24,68
3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	78,78	94,89	-
4	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	75%	97,31	-
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada DKPP	Nilai Reformasi Birokrasi DKPP	32,17	85,90	-

Untuk menentukan *Tingkat Efisiensi* maka digunakan formula yaitu:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \% \text{ capaian kinerja} - \% \text{ penyerapan anggaran}$$

Berdasarkan tabel 3.20 di atas disimpulkan bahwa tingkat efisiensi hanya terdapat pada 1 (satu) sasaran strategis yaitu “**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap**” sebesar 24,68%, sementara untuk 4 (empat) sasaran strategis lainnya tidak dapat ditentukan tingkat efisiensinya karena capaian kerjanya tidak tercapai sebesar 100%, sementara untuk menetapkan adanya efisiensi anggaran adalah apabila kinerja sasaran strategisnya tercapai sesuai yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja dan terdapat sisa anggarannya.

3.4. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan review dan evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang termasuk LKJIP oleh Inspektorat Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dan diperoleh skor nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah **68.30** atau **kategori B** dengan interpretasi **Baik**.

Adapun hasil tindak lanjut atas rekomendasi APIP (Inspektorat Kabupaten Ketapang) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Daftar Rekomendasi APIP atas Evaluasi dan Review LKJIP Tahun sebelumnya
serta Tindak Lanjut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Memanfaatkan informasi kinerja dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.	Implementasi pemanfaatan informasi kinerja telah ditindaklanjuti dengan memanfaatkan hasil capaian kinerja dalam LKJIP untuk menguraikan kinerja dan capaian indikator kinerja. Menyusun Matrik Program Kegiatan, pembahasan, perbaikan yang menjadi acuan pelaksanaan program di Dinas Ketahanan dan Perikanan agar focus pada pencapaian IKU DKPP setiap tahun.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2	Mengembangkan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi.	Implementasi pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi berbasis online melalui aplikasi KOKITA. Operator masing-masing unit DKPP sudah dilakukan pelatihan untuk aplikasi KOKITA dan setiap triwulan dilakukan MONEV Kinerja Lintas Unit.
3	Memberikan reward dan punishment terkait hasil kinerja	Untuk sistem Reward belum dapat di tindaklanjuti karena harus di konsultasikan dengan BKPSDM terkait pedoman dan ketentuan pemberian reward. Untuk punishment dilakukan melalui kegiatan Monev dan melalui Aplikasi SINTARI. terhadap pegawai yang berkinerja rendah dan tidak disiplin diberikan peringatan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Mempublikasikan dokumen-dokumen terkait SAKIP agar dapat di akses secara online (website)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut dengan menginformasikan Dokumen SAKIP berbasis online melalui website DKPP yaitu pada alamat: www.dkpp.ketapangkab.go.id

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ini merupakan wujud pertanggungjawaban capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis, dengan 7 (tujuh) indikator kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks ketersediaan pangan, capaian kerjanya adalah 84,22 dari target sebesar 86,73 atau 97,11%.
- 2) Indeks keterjangkauan pangan, capaian kerjanya adalah 83,30 dari target sebesar 82,32 atau 101,19%.
- 3) Indeks Pemanfaatan Pangan, capaian kerjanya adalah 60,38 dari target sebesar 61,43 atau 98,29%.
- 4) Jumlah produksi perikanan tangkap, capaian kerjanya adalah sebesar 25.370 ton dari target 24.428,05 ton atau 105,33%.
- 5) Jumlah produksi perikanan budidaya, capaian kerjanya adalah 16.377,15 ton dari target sebesar 20.787,93 ton atau 78,78%.
- 6) Persentase Produk Perikanan yang bersertifikat, capaian kerjanya adalah 8,25% dari target 11% atau 75,0%.
- 7) Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dalam rangka **Mewujudkan Pemerintahan yang Handal, Bersih, Terpercaya, dan Berwibawa dalam Pelayanan Publik** adalah 3,86 dari target sebesar 12 atau 32,17%.

Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022, sebesar **Rp.18.645.193.608,-** (sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Honorarium Tenaga Non PNS) dengan realisasi sebesar **Rp.16.393.942.102,96,-** atau **87,93%**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran strategis adalah:

- 1) Perencanaan yang baik sesuai program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan dampak dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana perikanan walaupun masih belum memadai sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan;
- 3) Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati.
- 4) Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas walaupun masih belum memadai sesuai kebutuhan.

Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang ketahanan pangan dan perikanan dalam rangka mencapai sasaran strategis antara lain:

1. Anggaran dalam rangka mencapai indikator sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan”** Tahun 2022 masih belum memadai melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sehingga capaian kinerja masih rendah dan upaya pembinaan dan monitoring untuk mendorong kelompok usaha pengolahan perikanan melaksanakan sertifikasi produk olahannya belum terlaksana dengan baik.
2. Penyediaan kebutuhan sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih terbatas sementara kebutuhan kelompok kelompok usaha perikanan masih sangat sangat tinggi/banyak.
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Ketahanan dan Perikanan sudah mengikuti tahapan dalam PMPRB, dan sudah mulai dibudayakan namun masih banyak sub kegiatan dari 8 area perubahan Reformasi Birokrasi baru pada tataran ketersediaan dokumen, belum menuju perbaikan yang berkesinambungan secara terus menerus agar menjadi budaya kerja sehari hari dalam rangka memberikan pelayanan publik.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis pada masa mendatang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, fokus pada program dan kegiatan prioritas terutama dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DKPP periode Tahun 2021-2026 serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
2. Pembenahan internal organisasi secara terus menerus melalui aksi-aksi perubahan serta berupaya meningkatkan kapasitas dan disiplin aparatur akan tanggungjawabnya masing-masing serta melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan hingga akhir masa periode Renstra yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG SEBELUM APBD PERUBAHAN DAN SETELAH APBD PERUBAHAN TAHUN 2022



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jalan Jendral Sudirman No. 15, Kode Pos : 78813

Telp (0534) 32753 Faks. (0534) 32753

E-mail : dkpp@ketapangkab.go.id Website : <https://www.dkpp.ketapang.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Heryandi, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Martin Rantan, S.H., M.Sos**

Jabatan : **Bupati Kabupaten Ketapang**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Martin Rantan, S.H., M.Sos

Pihak Pertama,

Drs. Heryandi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19711023 199101 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KETAPANG

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	24428,0 5 Ton
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	20787,9 3 Ton
3.	Meningkatnya Kualitas Produksi Perikanan	Persentase Produk Perikanan yang Bersertifikat	11%
4.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan/Indeks Ketersediaan	86,73%
5.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Pemanfaatan	61,43
6.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Keterjangkauan	82,32
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang	12

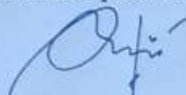
	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.198.758.628	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp. 1.130.000.000	
3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 403.327.483	
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 38.706.735	
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 48.500.000	
6.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 3.508.292.159	
7.	Program Pengelolaam Perikanan Budidaya	Rp. 1.962.814.702	

Program	Anggaran	Keterangan
8. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 227.636.638	

Ketapang, 2022

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang



Drs. Heryandi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19711023 199101 1 001

Pihak Kedua,

Bupati Kabupaten Ketapang

Martin Rantan, S.H., M.Sos

LAMPIRAN 2

**FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN
DALAM RANGKA Mendukung Pencapaian
Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Ketapang
Tahun Anggaran 2022**

Rapat Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022



Peletakan Batu Pertama Pembangunan Lumbung Pangan Oleh Kadis DKPP di Desa Sukamaju Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Tahun 2022



Rapat Koordinasi Tim Ketahanan dan Kerawanan Pangan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022



**Pembangunan Steigher/Tambahan Perahu Nelayan
di Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



**Pembangunan Steigher/Tambahan Perahu Nelayan di Desa Sei Tengar
Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



**Lanjutan Pembangunan Steigher/Tambahan Perahu Nelayan di Desa Kuala Satong
Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



**Peningkatan Sarana Prasarana TPI Ranga Sentap Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



**Bantuan Mesin Kapal untuk KUB Nelayan di Kecamatan
di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



**Bantuan Mesin Kapal untuk KUB Nelayan di Kecamatan
di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



**Bantuan Mesin Kapal untuk KUB Nelayan di Kecamatan
di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



**Pembangunan Bioflok Percontohan di Desa Baru Kecamatan Benua Kayong
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



**Pembangunan Bioflok Percontohan di Desa Mekar Sari Kecamatan Benua Kayong
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



**Pembangunan Bioflok Percontohan di Desa Sei Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022**



Peningkatan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Sandai sebagai Upaya Peningkatan Fungsi BBI di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2022

